

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Definisi Otonomi Daerah

Otonomi dalam bahasa Indonesia ialah hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Koesoemahatmadja, 1979: 281).

Sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Daerah Otonom menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Siswanto, 2006:6).

Pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sedangkan peraturan daerah yang selanjutnya disebut dengan Perda adalah peraturan daerah provinsi dan atau peraturan daerah kabupaten dan kota.

Dari pengertian di atas, maka dapat diketahui bahwa Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah merupakan daerah yang diberikan hak otonomi untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah.

Selanjutnya pada bab kedua ini penulis akan memaparkan beberapa teori-teori menurut para ahli yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis temukan dalam penelitian ini, dan pemaparan teori-teori ini merupakan kerangka pemikiran yang dianggap mampu memudahkan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

2.2. Definisi Pemerintahan

Pemerintahan merupakan proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia, badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat (Ndraha, 2005: 36).

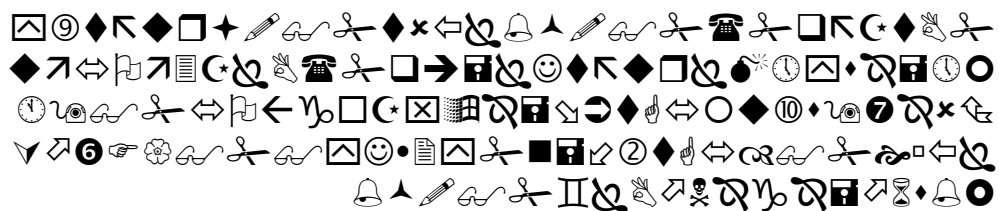
Menurut Syafiie (2003:22), Pemerintahan adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan serta bagaimana manusia itu bisa diperintah.

Menurut Ndraha (2003: 6), Pemerintah adalah organisasi yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah.

Soemantri (dalam Pipin;2005;72) mengatakan bahwa istilah pemerintahan berasal dari kata perintah yang berarti, menyuruh melakukan

sesuatu sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintahan adalah kekuasaan yang memerintah suatu negara / badan tertinggi yang memerintah suatu negara, seperti kabinet merupakan suatu pemerintah. Istilah pemerintahan diartikan dengan perbuatan memerintah.

Sepertifirman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 55 yang berbunyi:



“dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa.”

Utrech (2002: 14) mendefenisikan pemerintah dalam tiga pengertian:

1. Pemerintah sebagai gabungan dari semua badan kenegaraan tertinggi yang berkuasa,
2. Pemerintah sebagai gabungan dari semua badan kenegaraan tertinggi yang berkuasa diwilayah suatu negara,
3. Pemerintah dalam arti kepala negara (presiden beserta para mentrinya).

Sedangkan Pemerintahan menurut C. F. Strong dalam Pamudji (1992: 23) yaitu organisasi dalam mana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Sedangkan pemerintah adalah kekuasaan memerintah suatu negara (daerah negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah).

Syafee (dalam Pipin, 2005: 73) mengatakan bahwa istilah pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Disebut sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan karena memenuhi syarat- syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek materil maupun formal, sifatnya universal, sistematis serta spesifik dan dikatakan sebagai seni karena banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan mampu berkiat serta dengan karismatik menjalankan roda pemerintahan.

Menurut Sedarmayanti (2004: 35) Pemerintah atau Government adalah lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian atau negara kota dan sebagainya. Sedangkan Pemerintahan atau Governance adalah tindakan dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Widjaja (2005: 18) Pemerintahan Daerah dibentuk mengandung 2 unsur, yang pertama terbentuknya daerah otonom dan otonomi daerah, unsur yang kedua adalah penyerahan fungsi pemerintahan kepada daerah otonom. Kedua unsur tersebut dilakukan melalui produk hukum dan konstitusi dan melembaga.

Selanjutnya Widjaja (2005: 44) mengatakan bahwa fungsi pemerintahan adalah pengertian urusan pemerintahan diluar fungsi lembaga tertinggi dan tinggi Negara lainnya (fungsi eksekutif) yang dilakukan Presiden, dengan demikian urusan pemerintahan ini tidak mencampuri fungsi Legislatif dan fungsi Yudikatif.

Ndraha (2005: 57) menjelaskan bahwa fungsi bersifat objektif sedangkan tugas subjektif. Adapun fungsi pemerintahan ada tiga, pertama

adalah fungsi pembangunan, kedua adalah fungsi pemberdayaan dan ketiga adalah fungsi pelayanan.

Menurut Santosa (1993:21) adapun tugas-tugas pemerintahan antara lain:

1. Melaksanakan Pembangunan (Birokrasi Pembangunan)

Masalah pembangunan sesungguhnya harus dibagi kedalam dua bagian besar yakni masalah objek pembangunan dan subjek yang membangun kondisi lingkungannya. Selanjutnya adalah masalah subjek pembangunan atau manusia pembangunan hakekatnya menyangkut masalah sosial, politik, pendidikan dan manajemen pemerintahan. Pihak kecamatan melaksanakan pembangunan dengan melakukan perencanaan pembangunan berdasarkan proses pengambilan keputusan publik. Perencanaan Pembangunan ini melibatkan peran serta beberapa pihak dan masyarakat dalam rangka menunjang pembangunan nasional.

2. Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam hal ini pihak kecamatan sebagai rangkaian organisasi pemerintahan yang menunjukkan tugas-tugas pemerintahan umum termasuk memelihara ketertiban dan keamanan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

3. Memberikan Pelayanan Publik.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pemerintahan sebagai pelayan masyarakat maka diperlukan adanya aparatur yang mempunyai kemampuan proporsional dan handal untuk melaksanakan tugasnya. Salah

satu organisasi pemerintahan yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan secara umum adalah pemerintah kecamatan dan perangkat kecamatan, serta dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dapat berbentuk pelayanan administrasi kependudukan.

Siagian (2006: 128-129) mengatakan teori klasik mengajarkan bahwa pemerintahan negara pada hakikatnya menyelenggarakan dua jenis fungsi utama, yaitu fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan. Fungsi pengaturan biasanya dikaitkan dengan hakikat negara modern sebagai suatu negara hukum (*legal state*) sedangkan fungsi pelayanan dikaitkan dengan hakikat negara sebagai suatu negara kesejahteraan (*welfare state*). Baik fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan menyangkut semua segi kehidupan dan penghidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan pelaksanaannya dipercayakan kepada aparat pemerintah tertentu yang secara fungsional bertanggungjawab atas bidang-bidang tertentu kedua fungsi tersebut.

Menurut Widodo(2001: 2) pemerintah lokal merupakan pemerintah yang didekatkan dengan rakyat, dengan demikian akan dapat mengenali apa yang menjadi kebutuhan, permasalahan, keinginan dan kepentingan serta aspirasi rakyat secara baik dan benar, karena kebijakan yang dibuat akan mencerminkan apa yang menjadi kepentingan dan aspirasi rakyat yang dilayaninya. Diantara tugas terpenting negara pada masa kedepan yang diciptakan oleh lingkungan politik adalah mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan mendefenisikan kembali peran pemerintah dalam mengintegrasikan sosial, ekonomi, lingkungan, ketentraman dalam

masyarakat (*the vulnerable in the population*), menciptakan komitmen politik, menyediakan infrastruktur, desentralisasi dan demokratisasi pemerintahan, memperkuat finansial dan kepastian administratif pemerintahan lokal.

Dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah berbunyi: Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak:

1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
2. Memilih pimpinan daerah;
3. Mengelola aparatur daerah;
4. Mengelola kekayaan daerah;
5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
6. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam lainnya yang berada di daerah;
7. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah berbunyi:

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban:

1. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
3. Mengadakan kehidupan demokrasi;

4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan;
5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
6. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
7. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
8. Mengembangkan sistem jaminan sosial;
9. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
10. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
11. Melestarikan lingkungan hidup;
12. Mengelola administrasi kependudukan;
13. Melestarikan nilai sosial budaya;
14. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya, dan
15. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2.3. Fungsi Pemerintahan

Fungsi ilmu pengetahuan pada umumnya mempunyai 2 fungsi, ke luar dan ke dalam. Ke luar, suatu ilmu pengetahuan berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi suatu objek, merekam dan menggambarkan suatu keadaan, menerangkan hubungan antar gejala, menguji pengetahuan lain, dan meramalkan apa yang akan dan dapat terjadi. Untuk mewujudkan semua tugas pemerintahan, pemerintah harus melaksanakan fungsi yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Fungsi pengaturan, fungsi pengaturan ini dilakukan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan yang akan mengatur hubungan

dalam masyarakat, karena masyarakat menghendaki adanya aturan atau tataan yang disepakati oleh semua pihak. Dalam hal ini pemerintah memegang hak yang dapat melakukan, menerapkan peraturan dan memberikan sanksi pada para pelanggarnya.

2. Fungsi pemberdayaan, dalam fungsi ini pemerintah dibebani kewajiban untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan pemerintahan. Kecuali pemberdayaan itu juga dilakukan di kalangan para aparat pemerintah sendiri agar mereka lebih berkualitas dalam melaksanakan secara optimal jika pelaksanaannya cukup tangguh dan berbobot.
3. Fungsi pelayanan, fungsi ini merupakan fungsi utama pemerintah karena dengan adanya fungsi ini diharapkan pemerintah akan dapat mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi rakyatnya.

Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. (Soekamto, 2001: 269).

Peran sosial adalah peran yang diharapkan oleh masyarakat yang dilakukan oleh seseorang yang karena kualitas-kualitas serta sarana tertentu yang dimilikinya diperkirakan dapat memenuhi harapan tersebut. (Winardi, 1990: 41).

Syaukani (2004: 1) mengatakan bahwa pada hakikatnya, pembangunan adalah upaya perbaikan secara terencana dari suatu situasi ke situasi lain yang

dianggap lebih baik.

Pembangunan adalah kegiatan atau usaha secara sadar yang terencana dan berkelanjutan untuk merubah kondisi suatu masyarakat menuju kondisi yang lebih baik menyangkut semua aspek kehidupan fisik dan non fisik yang meliputi: ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya dan ketahanan masyarakat. (Sufian, 2003: 1)

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pendapatan daerah bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Dana Perimbangan,dan
3. Lain-lain pendapatan.

Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pendapatan asli daerah bersumber dari:

1. Pajak daerah;
2. Retribusi daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. Lain-lain PAD yang sah.

Sebagaimana dalam pasal 18 Undang-Undang 1945 Amandemen kedua tercantum tentang bagaimana pemerintah daerah dalam mengatur daerahnya masing-masing yaitu sebagai berikut:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah dan daerah-daerah itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.
2. Pemerintah Daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintah Daerah kabupaten dan kota memiliki dewan perwakilan rakyat daerah yang dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis.
5. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang diatur oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.
6. Pemerintah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Antara penguasa dan masyarakat terjalin suatu hubungan timbal balik, dimana pada suatu sisi masyarakat mempengaruhi penguasa dalam menjalankan tugasnya, pada sisi lain penguasa memberi pengaruh tertentu pada masyarakat. Dalam masyarakat penguasa melaksanakan aneka ragam

tugas, terutama menyangkut peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh para warga.

Pembuatan kebijakan merupakan sebuah aktifitas yang diarahkan kepada tujuan, sebagai yang memiliki ciri tersendiri dari aktifitas fisik yang bertujuan untuk mempengaruhi prospektif alternatif dalam arah yang dikehendaki. (Tangkilisan, 2003: 6).

Kebijakan tersebut didefinisikan oleh Eulau Kenneth Prewitt dalam Jones (1991: 47) yaitu prosedur mewujudkan sesuatu berdasarkan aturan tertentu. Disebut juga bahwa kebijakan tersebut berbentuk nyata dari kebijaksanaan.

Kebijaksanaan merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dan aparat pemerintah, sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu. (Kansil dan Christine, 2003: 190).

Menurut Anderson dalam Nurcholis (2005: 159) Kebijakan Publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Selanjutnya Anderson menjelaskan bahwa terdapat lima hal yang berhubungan dengan kebijakan publik, Pertama: tujuan atau kegiatan yang berorientasi tujuan haruslah menjadi perhatian utama perilaku acak atau peristiwa yang tiba-tiba terjadi, Kedua: kebijakan merupakan pola tindakan pejabat pemerintah mengenai keputusan-keputusan secara terpisah, Ketiga: kebijakan harus mencakup apa yang secara nyata pemerintah perbuat bukan apa yang mereka maksud untuk berbuat atau apa

yang mereka katakan akan dikerjakan, Keempat: bentuk kebijakan bisa berupa hal yang positif atau negatif, Kelima: kebijakan publik dalam bentuknya yang positif didasarkan pada ketentuan hukum dan kewenangan. Sedangkan tujuan kebijakan publik adalah dapat dicapainya kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

2.4. Definisi Peranan

Peran adalah salah satu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Soekanto (2005: 269) kata peranan mencakup sedikitnya tiga pengertian:

1. Peranan meliputi norma- normayang dihubungkan dengan posisi atau tempat seorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat dalam organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Selajutnya Ndraha, (1987: 53) Peranan diartikan sebagai suatu perilaku yang diharapkan dari atau telah ditetapkan bagi pemerintahan selaku administrator disetiap jenjang pemerintahan.

Menurut Astrid S, Susanto menjelaskan (dalam Soekanto, 2001: 91) dengan adanya pretise dan derajat sosial maka terbentuk pula apa yang dikenal sebagai status dari peranan. Status adalah kedudukan sebagai yang ditinjau dari individu, peranan adalah dinamisasi dari status atau penggunaan dari hak dan kewajiban ataupun bisa disebut status objektif.

Levy (dalam Soekanto, 2001: 272), pentingnya pembahasan peranan yang melekat pada individu dalam masyarakat:

1. Bahwa peranan- peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungan.
2. Peranan tersebut hendaknya dilekatkan pada individu yang dianggap oleh masyarakat mampu melaksanakan.
3. Dalam masyarakat kadangkala dijumpai individu yang tidak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

2.5. Definisi Koordinasi

Koordinasi adalah penyesuaian diri dari masing-masing bagian, dan usaha menggerakkan serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok sehingga dengan demikian masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil. (Inu Kencana Syafee, 1989: 41).

Koordinasi adalah sinkronisasi yang teratur dari usaha-usaha untuk penciptaan pengaturan waktu dan terpinpin dalam hasil pelaksanaan yang harmonis dan bersatu untuk menghasilkan tujuan yang telah ditetapkan. (Inu

Kencana Syafee, 1989: 42).

Koordinasi Pemerintahan diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyeraskan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan yang spesifik atau berbeda agar semuanya terarah pada pencapaian tujuan tertentu pada saat yang telah ditetapkan. (Ndraha, 2003: 290).

Koordinasi dilatarbelakangi oleh:

1. Adanya hubungan independen dan berurutan secara objektif antara kegiatan yang satu dengan kegiatan yang lain.
2. Adanya hubungan fungsional, misalnya koordinasi antara Dinas Pendapatan Daerah dengan Satpol PP.

Bentuk koordinasi dalam lingkup unit kerja pemerintahan:

1. Koordinasi waktu atau sinkronisasi, merupakan proses untuk menentukan kegiatan mana yang dapat berjalan serentak dan harus berurutan.
2. Koordinasi ruang atau koordinasi wilayah, ditempuh jika suatu kegiatan melalui berbagai daerah kerja.
3. Koordinasi interinstitusional, yaitu koordinasi antar berbagai unit kerja yang berkepentingan atas suatu proyek serba guna atau produk bersama tertentu.
4. Koordinasi fungsional, koordinasi yang dilakukan oleh unit kerja yang satu terhadap unit kerja yang lain yang kegiatannya secara objektif berhubungan fungsional.
5. Koordinasi struktural, yaitu koordinasi antar unit yang berada di bawah struktur tertentu tanpa melalui superordinasi.

6. Koordinasi masukan-balik, yaitu koordinasi hasil kontrol terhadap setiap kegiatan unit kerja agar dapat dilakukan penyesuaian diri dan koreksi.

Jadi, Koordinasi Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai proses kesepakatan bersama antar badan/ instansi/ unit dalam pelaksanaan tugas secara mengikat berbagai kegiatan ataupun unsur yang terlibat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang berbeda-beda pada dimensi waktu, tempat, komponen, fungsi, dan kepentingan antar pemerintah dengan yang diperintah, sehingga disuatu sisi semua kegiatan kedua belah pihak terarah pada tujuan pemerintahan yang telah ditetapkan bersama, dan di sisi lain keberhasilan pihak yang satu tidak dirusak oleh keberhasilan pihak yang lain.

2.6. Definisi Reklame

Secara etimologis kata Reklame berasal dari kata “*reclomos*”, *re* yang berarti ulang dan *clomos* yang berarti panggilan atau teriakan. Jadi Reklame dapat diartikan sebagai panggilan yang berulang-ulang.

Secara umum Reklame diartikan sebagai media propaganda yang berfungsi untuk memperkenalkan dan menawarkan barang dagangan atau jasa agar dikenal oleh masyarakat luas.

Namun secara luas Reklame dapat pula diartikan sebagai suatu karya seni rupa yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan atau menawarkan produk kepada konsumen dengan cara yang menarik sehingga konsumen ingin memiliki, menggunakan atau membelinya.

Menurut Siahaan (2010: 382), reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan

komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.

A. Fungsi Reklame

Reklame berfungsi sebagai :

- Memperkenalkan suatu produk pada khalayak atau masyarakat,
- Agar pembeli lebih tertarik untuk menggunakan produk yang ditawarkan.
- Agar perusahaan dapat banyak keuntungan.

B. Tujuan Reklame

a. Reklame sosial

Bertujuan untuk memperkenalkan atau menawarkan barang atau jasa kepada masyarakat.

b. Reklame Sosial

Bertujuan memberitahukan atau himbauan kepada masyarakat agar berbuat sesuatu.

C. Jenis-jenis Reklame

a. Reklame Audio

Reklame yang disampaikan lewat suara yang diterima dengan indra pendengaran.

b. Reklame visual

Reklame yang disampaikan lewat tulisan dan gambar, baik gambar diam ataupun gambar yang bergerak, yang dapat diterima indra penglihatan.

c. Reklame Audio Visual

Reklame yang disampaikan lewat tulisan, gambar dan suara. Yang dapat diterima dengan indra pendengaran dan penglihatan.

D. Penyampaian Reklame

a. Melalui Audio

Dalam bentuk reklame tradisional. Tetapi sekarang sudah ada reklame audio yang modern seperti reklame melalui siaran radio, pesan atau penawaran dilakukan dengan cara diucapkan atau dibacakan dengan dialog.

b. Melalui visual

- Poster

Merupakan bentuk reklame berupa gambar dan tulisan pada selembar kertas dan ditempel ditempat-tempat umum.

- Iklan

Jenis reklame yang bentuknya singkat dan dimuat dimedia cetak seperti Koran, tabloid atau majalah.

- Plakat

Bentuknya sama seperti poster hanya ukurannya saja yang lebih kecil dan biasanya ditempel ditembok atau dipohon-pohon ditepi jalan. Penyajiannya lebih sederhana dibandingkan poster.

- Spanduk

Berbentuk selebar kain yang direntangkan melintang di atas jalan raya atau tepi jalan. Tulisan pada spanduk lebih sederhana dan mudah dibaca serta dipahami para pemakai jalan atau pengendara.

- Selebaran

Bentuknya kecil seperti plakat namun tetapi sudah dilengkapi dengan gambar. Ciri khas dari bentuk reklame ini adalah cara penyampaikannya yaitu diberikan langsung dari tangan ke tangan kepada calon konsumen.

- Baliho

Bersifat sementara dan ukurannya besar dan diletakan di tepi-tepi jalan yang strategis, dibuat secara semi permanen dengan bamboo, kayu, atau pipa besi penyangga. Namun sekarang sudah banyak dijumpai bentuk baliho yang menggunakan media kain atau kertas yang berukuran sangat besar dan ditempel pada tempat khusus.

- Biliboard

Hampir sama dengan baliho karna berukuran besar, tetapi jenis reklame ini sifatnya lebih permanen Karen dipasang dalam waktu yang cukup lama dan ditempatkan diatap atau diatas pertokoan.

- Buklet

Berbentuk seperti buku karena tulisan dan gambarnya terdiri dari beberapa halaman yang dijilid atau dilipat-lipat. Informasi yang ingin disampaikan lebih lengkap.

- Embalase

Bentuk reklame yang dibuat langsung pada permukaan kemasan barang atau produk.

- Mobile

Reklame berbentuk media tiga dimensi yang dapat bergerak. Baik yang dapat bergerak sendiri karena tertiuip angin atau dengan menggunakan mesin penggerak bertenaga battery/listrik.

- Etalase

Reklame tiga dimensi yang terdapat pada ruang kaca di depan-depan toko. Memamerkan barang yang dijual dengan penataan yang menarik. Biasanya menggunakan patung untuk memamerkan pakaian yang dijual.

c. Melalui Audio-Visual

Iklan yang ditayangkan di televisi, slide atau video klip. Penyampaian reklame ini dengan media ini dianggap paling berhasil karena menarik dan lebih mudah dipahami orang.

2.7. Teori Ketertiban Umum

Ketertiban umum adalah suatu keadaan atau kondisi dimana pemerintah mengharuskan kepada setiap warganya untuk senantiasa menjaga dan melakukan ketertiban, kesejahteraan, dan keamanan di tempat-tempat yang telah ditentukan sehingga mampu menciptakan suatu keadaan yang lebih nyaman dan teratur.

Manusia telah diperingatkan Allah SWT dan Rasul agar jangan melakukan Kerusakan, Allah SWT berfirman:

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Istilah ketertiban umum menurut Kollewijn (1989: 56) memiliki sejumlah variasi pengertian.

Pertama, ketertiban umum dalam hukum perikatan merupakan batasan dari asas kebebasan berkontrak. Kedua, sebagai unsur pokok dalam ketertiban, kesejahteraan, dan keamanan (*rust en veiligheid*). Ketiga, sebagai pasangan dari kesusilaan yang baik (*goede zeden*). Keempat, sebagai sinonim dari ketertiban hukum (*rechtsorde*), dan kelima adalah sebagai keadilan. Namun yang terpenting adalah ketertiban umum harus dikaitkan dengan terciptanya kondisi yang tertib, terciptanya kesejahteraan, serta adanya rasa aman yang diberikan oleh lembaga hukum melalui ketertiban hukum yang telah dibuat.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.

2.8. Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

1. Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja

Satpol PP mempunyai tugas dalam penegakan Perda dan menyelenggarakan ketertiban Umum serta ketentraman Masyarakat dan perlindungan Masyarakat.

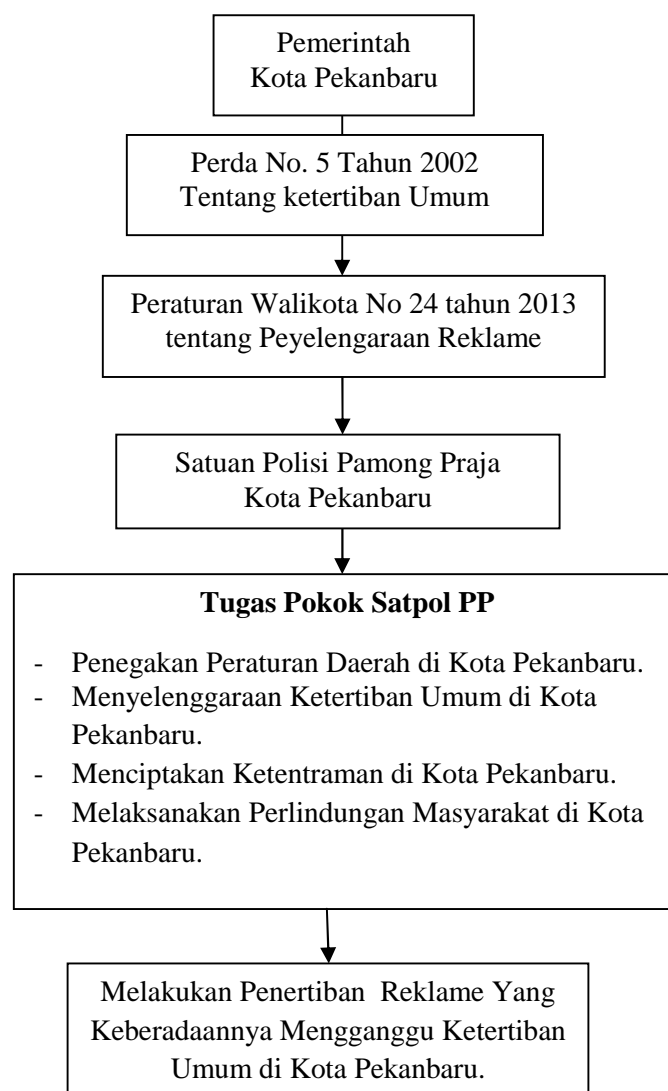
2. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program dan pelaksanaan Perda
2. Pelaksanaan kebijakan ketentraman, ketertiban umum dan kebijakan penegakan peraturan daerah ;
3. Pelaksana koordinasi peraturan daerah ;
4. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan kepala Daerah.

2.9. Kerangka Pemikiran

Adapun Kerangka Pikiran dari Penelitian Mengenai Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum (Studi Penertiban Reklame di Kota Pekanbaru) adalah sebagai berikut:



2.10. Konsep Operasional

Konsep adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Operasional adalah unsur-unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana mengukur suatu variabel sehingga dengan pengukuran tersebut dapat diketahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisa ke dalam variabel-variabel tersebut.

Tujuannya adalah untuk memudahkan pemahaman dan menghindari terjadinya interpretasi ganda dari variabel yang diteliti. Untuk mendapatkan batasan yang jelas dari masing-masing konsep yang diteliti, maka dalam hal ini dapat dikemukakan definisi dari konsep yang dipergunakan, yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

Peranan yang dimaksudkan dalam penelitian ini mencakup kepada:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penegakan Perda, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur / badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda atau Peraturan Kepala Daerah.
- d. Menindak warga masyarakat, aparatur / badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

2. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru adalah aparaturnya atau perangkat Pemerintah Kota Pekanbaru yang melaksanakan tugas Walikota dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.
3. Ketertiban umum adalah suatu keadaan atau kondisi dimana pemerintah mengharuskan kepada setiap warganya untuk senantiasa menjaga dan melakukan ketertiban, kesejahteraan, dan keamanan di tempat-tempat yang telah ditentukan sehingga mampu menciptakan suatu keadaan yang lebih nyaman dan teratur.
4. Penegakan ketertiban umum adalah suatu upaya atau tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru dalam memelihara ketertiban umum di Kota Pekanbaru
5. Pelaksanaan Ketentraman adalah suatu cara untuk menciptakan kondisi yang tentram di dalam masyarakat melalui sosialisasi produk hukum terutama Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah.
6. Pelaksanaan Koordinasi adalah suatu penyelarasan hubungan antara Satpol PP Kota Pekanbaru dengan lembaga atau instansi terkait guna adanya penyatuan gerak dari masing - masing organisasi agar tercapainya tujuan dan sasaran yang diinginkan.

2.11. Definisi Konsep

1. Peranan diartikan sebagai suatu perilaku yang diharapkan dari atau telah ditetapkan bagi pemerintahan selaku administrator di setiap jenjang pemerintahan.
2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 Satuan Polisi Pamong Praja disingkat Satpol PP, adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah

dan melaksanakan tugas kepala daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum.

3. Ketertiban umum adalah suatu keadaan atau kondisi dimana pemerintah mengharuskan kepada setiap warganya untuk senantiasa menjaga dan melakukan ketertiban, kesejahteraan, dan keamanan di tempat-tempat yang telah ditentukan sehingga mampu menciptakan suatu keadaan yang lebih nyaman dan teratur.
4. Reklame adalah suatu karya seni rupa yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan atau menawarkan produk kepada konsumen dengan cara yang menarik sehingga konsumen ingin memiliki, menggunakan atau membelinya.

2.12. Operasional Variabel

Tabel 2.1 : Operasional Variabel Penelitian Mengenai Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menegakan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2002 tentang Ketertiban Umum (Studi Penertiban Reklame di Kota Pekanbaru) adalah sebagai berikut :

Referensi	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Skala Pengukuran
1	2	3	4	5
Peranan menurut Soekanto (2001:269) mencakup sedikitnya tiga pengertian : a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat. b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa	Peranan Satuan Polisi Pamong Praja	1. Penegakan Ketertiban Umum 2. Pelaksanaan Ketertiban Umum	a. Adanya prosedur dalam penertiban. b. Melakukan tindakan pembongkaran terhadap pelanggaran ketertiban umum. c. Adanya sanksi bagi yang melanggar ketertiban umum. a. Melakukan razia rutin. b. Melakukan pengawasan terhadap pemasangan reklame. c. Melakukan pendataan terhadap reklame yang mengganggu ketertiban umum.	Berperan Cukup berperan Tidak berperan Berperan Cukup berperan Tidak berperan

yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.		3. Pelaksanaan Ketentraman	a. Adanya himbauan kepada masyarakat untuk menjaga ketertiban umum. b. Melakukan sosialisasi tentang Perda ketertiban umum.	Berperan Cukup berperan Tidak berperan
		4. Pelaksanaan Koordinasi	c. Melakukan pendekatan persuasive kepada masyarakat. a. Adanyakoordinasi dengan Dispenda. b. Adanya pembagian tugas antara Satpol PP dengan Dispenda.	

2. 13. Teknik Pengukuran

Untuk menjawab tujuan dari penelitian ini, maka dapat ditetapkan ukuran untuk variabel indikator sebagai berikut :

1. Penegakan Ketertiban Umum.

Berperan :Apabila adanya prosedur dalam penertiban, melakukan tindakan pembongkaran terhadap pelanggaran ketertiban umum, dan adanya sanksi bagi yang melanggar ketertiban umum.

Cukup Berperan :Apabila hanya melaksanakan satu item di antara adanya prosedur dalam penertiban, melakukan tindakan pembongkaran terhadap pelanggaran ketertiban umum, dan adanya sanksi bagi yang melanggar ketertiban umum.

Tidak Berperan :Apabila tidak adanya prosedur dalam penertiban, tidak adanya tindakan pembongkaran terhadap pelanggaran ketertiban umum, dan tidak adanya sanksi bagi yang melanggar ketertiban umum.

2. Pelaksanaan Ketertiban Umum.

- Berperan** :Apabila melakukan razia rutin, melakukan pengawasan terhadap pemasangan reklame, dan melakukan pendataan terhadap reklame yang mengganggu ketertiban umum.
- Cukup Berperan** :Apabila hanya melaksanakan satu item di antara melakukan razia rutin, melakukan pengawasan terhadap pemasangan reklame, dan melakukan pendataan terhadap reklame yang mengganggu ketertiban umum.
- Tidak Berperan** :Apabila tidak adanya melakukan razia rutin, melakukan pengawasan terhadap pemasangan reklame, dan melakukan pendataan terhadap reklame yang mengganggu ketertiban umum.

3. Pelaksanaan Ketentraman.

- Berperan** :Apabila adanya himbauan kepada masyarakat untuk menjaga ketertiban umum, melakukan sosialisasi tentang Perda ketertiban umum, dan melakukan pendekatan persuasive kepada masyarakat.
- Cukup Berperan** :Apabila hanya melaksanakan satu item di antara adanya himbauan kepada masyarakat untuk menjaga ketertiban umum, melakukan sosialisasi tentang Perda ketertiban umum, dan melakukan pendekatan persuasive kepada masyarakat.
- Tidak Berperan** :Apabila tidak adanya melakukan himbauan kepada masyarakat untuk menjaga ketertiban umum, melakukan sosialisasi tentang Perda ketertiban umum, dan melakukan pendekatan persuasive kepada masyarakat.

4. Pelaksanaan Koordinasi.

- Berperan :Apabila adanya koordinasi dengan Dispenda serta adanya pembagian tugas antara Satpol PP dengan Dispenda.
- Cukup Berperan :Apabila hanya melaksanakan satu item di antara adanya koordinasi dengan Dispenda dan adanya pembagian tugas antara Satpol PP dengan Dispenda.
- Tidak Berperan :Apabila tidak adanya koordinasi dengan Dispenda serta adanya pembagian tugas antara Satpol PP dengan Dispenda.